

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELELITIAN

2.1 Pembentukan Kabupaten Pemalang

Kabupaten Pemalang ditetapkan sebagai salah satu daerah kabupaten dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Berdasarkan peraturan tersebut, Kabupaten Pemalang dipimpin oleh seorang Bupati. Bupati Pemalang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerahnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Bupati berpasangan dengan wakil bupati yang dipilih langsung oleh rakyat dan merupakan jabatan politis.

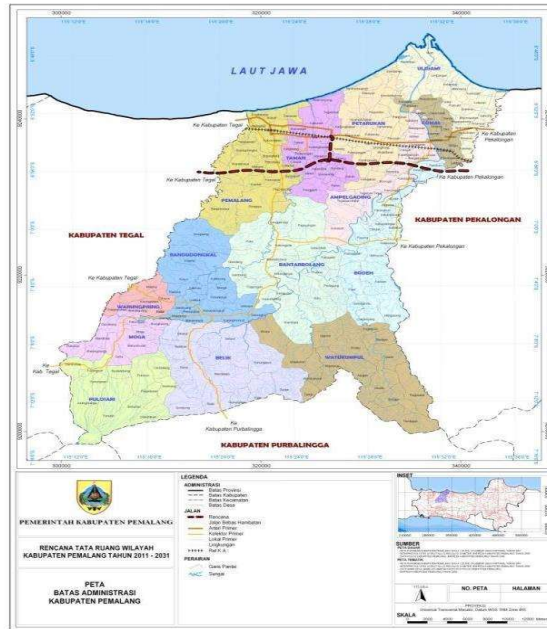
2.2 Data Geografis Wilayah

Kabupaten Pemalang menjadi salah satu kabupaten yang berada pada jalur transportasi pantai utara (pantura) Jawa. Luas wilayah Kabupaten Pemalang sebesar 111.530,570 Ha atau 1.115,30 km². Dari seluruh luas wilayah di Kabupaten Pemalang terdiri atas lahan sawah irigasi seluas 337,32 km², lahan sawah tadah hujan seluas 73,37 km² serta lahan bukan sawah 704,61 km². Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Bantarbolang sedangkan kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Warungpring.

Secara astronomis Kabupaten Pemalang berada pada 109⁰ 17' 30" sampai 109⁰ 40' 30" Bujur Timur (BT) dan 6⁰ 52' 30" sampai 7⁰ 20' 11" Lintang Selatan (LS). Secara geografis, wilayah Kabupaten Pemalang sebelah utara berbatasan dengan laut jawa dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga

dan Kabupaten Banyumas. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tegal.

Berikut batas wilayah administratif terlihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Pemalang
Sumber: RTRW Kabupaten Pemalang 2019-2023

Pada gambar 2.1 Kabupaten Pemalang terletak di jalur pantura Jawa menjadikan Kabupaten Pemalang menjadi wilayah strategis. Kabupaten Pemalang berada pada jalur pengembangan pembangunan poros Jakarta-Cirebon-Semarang-Surabaya. Jalur transportasi utama yang melintasi Kabupaten Pemalang adalah jalan tol trans Jawa, jalan arteri pantura Semarang-Cirebon, serta jalur kereta api Jakarta-Semarang-Surabaya.

2.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Pemalang

Pada tahun 2023, jumlah penduduk di Kabupaten Pemalang sebanyak 1.560.801 jiwa. Penduduk pria sebanyak 793.239 jiwa sedangkan penduduk wanita

767.562 jiwa. Berikut tabel jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Pemalang pada tahun 2023:

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Pemalang per-Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Moga	40.065	38.685	78.750
2	Pulosari	33.467	32.554	66.021
3	Belik	64.993	62.025	127.018
4	Watukumpul	41.148	38.665	79.813
5	Bodeh	33.383	32.287	65.670
6	Bantarbolang	45.848	44.683	90.531
7	Randudongkal	59.860	58.394	118.254
8	Pemalang	107.543	104.321	211.864
9	Taman	100.338	97.053	197.391
10	Petarukan	91.387	88.661	180.048
11	Ampelgading	39.704	39.222	78.926
12	Comal	50.257	48.809	99.066
13	Ulujami	61.028	59.047	120.075
14	Warungpring	24.218	23.156	47.374
Total		793.239	767.562	1.560.801

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel 2.1, terlihat bahwa ada dua kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi, yaitu Kecamatan Pemalang dan Kecamatan Taman. Kecamatan Pemalang mencatat jumlah penduduk sebanyak 211.864 jiwa, sedangkan Kecamatan Taman memiliki 197.391 jiwa. Angka-angka ini menunjukkan bahwa kedua kecamatan tersebut merupakan wilayah dengan populasi yang sangat padat, yang kemungkinan besar mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di sana, seperti kebutuhan infrastruktur, pelayanan publik, serta ketersediaan lapangan kerja.

Kepadatan penduduk yang tinggi di Kecamatan Pemalang dan Kecamatan Taman juga mengindikasikan adanya tingkat kompleksitas yang tinggi dalam manajemen wilayah dan pelayanan kepada masyarakat. Tingginya jumlah penduduk di kedua kecamatan ini dapat menimbulkan berbagai tantangan, seperti kemacetan lalu lintas, tekanan terhadap fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit, serta meningkatnya kebutuhan akan perumahan yang layak. Pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengelola pertumbuhan penduduk dan mengatasi berbagai permasalahan yang timbul akibat kepadatan penduduk yang tinggi, guna memastikan kualitas hidup masyarakat tetap terjaga.

Kecamatan Pemalang sebagai ibu kota Kabupaten Pemalang memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu sebesar 211.864 jiwa atau sekitar 13,57 persen dari total penduduk Kabupaten Pemalang. Kepadatan penduduk di Kabupaten Pemalang mencapai 1.345 jiwa/km². Kecamatan Comal menjadi kecamatan terpadat mencapai 3.584 jiwa/km² yang artinya setiap km² di Kecamatan Comal dihuni rata rata sebanyak 3.584 jiwa.

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan) di Kabupaten Pemalang pada tahun 2023 mencapai 195,84 ribu orang (15,06 persen) berkurang sebesar 19,24 ribu orang jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2022 yang tercatat sebesar 215,08 ribu orang (16,56 persen). Garis kemiskinan pada tahun 2023 sebesar Rp 429.549.

2.4 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pemalang

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri dari komponen kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran per kapita per tahun. Pada tahun 2023, Kabupaten Pemalang mencatat beberapa indikator penting yang menunjukkan kinerja dalam aspek-aspek tersebut. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 73,98 tahun, menunjukkan adanya peningkatan dalam pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Rata-rata lama sekolah adalah 6,55 tahun, sementara harapan lama sekolah tercatat sebesar 12,01 tahun, mengindikasikan upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Selain itu, pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan adalah sebesar Rp 9.587.000, yang mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat setempat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pemalang pada tahun 2023 mencapai angka 68,08, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 67,26. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pembangunan manusia di wilayah tersebut, meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Meskipun demikian, nilai IPM Pemalang masih menempati peringkat ke-35 dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menandakan bahwa meskipun terdapat kemajuan, Kabupaten Pemalang masih berada di posisi terbawah dalam peringkat IPM di provinsi tersebut, mengindikasikan perlunya perhatian lebih lanjut dan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya.

2.5 Gambaran Umum Kelurahan di Kabupaten Pemalang

Kelurahan adalah wilayah administratif di bawah kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Dalam konteks otonomi daerah, kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Hak mengatur wilayah kelurahan lebih terbatas dibanding desa. Sebuah desa dapat berubah status menjadi kelurahan dan sebuah kelurahan dapat berubah status menjadi desa.

Kabupaten Pemalang terdiri dari 14 kecamatan, dengan 212 desa dan 11 kelurahan. Jumlah dusun/lingkungan berjumlah 841 yang terdiri dari 6.470 RT dan 1.307 RW. Sebelas kelurahan di Kabupaten Pemalang tersebar pada 4 kecamatan. Ada tujuh kelurahan yang berada di Kecamatan Pemalang meliputi Kelurahan Paduraksa, Kelurahan Kebondalem, Kelurahan Bojongbata, Kelurahan Mulyoharjo, Kelurahan Pelutan, Kelurahan Sugihwaras, dan Kelurahan Widuri. Ada dua kelurahan yang berada di Kecamatan Taman meliputi Kelurahan Wanarejan Selatan dan Kelurahan Beji. Terdapat satu kelurahan di Kecamatan Petarukan yaitu Kelurahan Petarukan dan ada satu kelurahan di Kecamatan Comal yaitu Kelurahan Purwoharjo. Adapun sebaran kelurahan dan kode wilayah kelurahan di Kabupaten Pemalang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Sebaran Kelurahan Kab. Pemalang

NO	KODE	KECAMATAN	KELURAHAN
1	33.27.08	Kecamatan Pemalang	
	33.27.08.1004		1. Paduraksa
	33.27.08.1013		2. Kebondalem
	33.27.08.1014		3. Bojongbata
	33.27.08.1015		4. Mulyoharjo
	33.27.08.1016		5. Pelutan
	33.27.08.1018		6. Sugihwaras
	33.27.08.1019		7. Widuri
2	33.27.09	Kecamatan Taman	
	33.27.09.1015		1. Wanarejan Selatan
	33.27.09.1016		2. Beji
3	33.27.10	Kecamatan Petarukan	
	33.27.10.1006		1. Petarukan
4	33.27.12	Kecamatan Comal	
	33.27.12.1006		1. Purwoharjo
JUMLAH		4 Kecamatan	11 Kelurahan

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan, 2023

Dari tabel 2.2 tersebut, terlihat bahwa Kecamatan Pemalang memiliki jumlah kelurahan yang signifikan, yaitu sebanyak 7 (tujuh) kelurahan, yang terdiri dari Paduraksa, Kebondalem, Bojongbata, Mulyoharjo, Pelutan, Sugihwaras, dan Widuri. Sebaliknya, Kecamatan Taman hanya memiliki dua kelurahan, yaitu Beji dan Wanarejan Selatan. Selain itu, Kecamatan Petarukan dan Kecamatan Comal masing-masing hanya memiliki satu kelurahan, yaitu Kelurahan Petarukan dan Purwoharjo. Distribusi kelurahan yang terkonsentrasi di Kecamatan Pemalang ini menegaskan bahwa kecamatan tersebut memiliki peran penting dan membutuhkan perhatian khusus dalam hal pengelolaan administrasi dan pelayanan publik.

Dengan konsentrasi sebanyak 7 (tujuh) kelurahan di Kecamatan Pemalang, ada implikasi penting terhadap kebijakan alokasi anggaran. Kecamatan Pemalang memerlukan perhatian lebih dalam hal pengalokasian anggaran untuk kelurahan dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Keberadaan banyak kelurahan di satu kecamatan menuntut pengelolaan yang lebih kompleks dan sumber daya yang lebih besar untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, perencanaan anggaran harus mempertimbangkan kebutuhan khusus Kecamatan Pemalang untuk mendukung berbagai program pembangunan, infrastruktur, dan pelayanan masyarakat yang optimal. Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu merumuskan kebijakan yang tepat untuk memastikan bahwa alokasi anggaran untuk kelurahan di Kecamatan Pemalang dapat memenuhi kebutuhan dan mengatasi tantangan yang ada, guna mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga.

Selain itu, ketersediaan personel pegawai pada setiap kelurahan tidak kalah penting, karena hal ini sangat mempengaruhi kinerja kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah dan kompetensi pegawai yang memadai akan memastikan bahwa berbagai tugas administratif, pelayanan publik, dan program pembangunan dapat dijalankan dengan efisien dan efektif. Dengan adanya personel yang cukup, kelurahan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan warga, meningkatkan kualitas layanan, dan mempercepat penyelesaian masalah. Perencanaan dan penempatan sumber daya manusia pada setiap kelurahan menjadi faktor krusial dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik secara keseluruhan. Berikut tabel ketersediaan pegawai pada masing-masing kelurahan.

Tabel 2.3
Ketersediaan Pegawai Setiap Kelurahan

No	Kelurahan	Pegawai Menurut Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Mulyoharjo	0	6	5	0	11
2	Kebondalem	0	3	8	0	11
3	Pelutan	0	4	4	0	8
4	Paduraksa	0	7	6	0	13
5	Bojongbata	0	5	5	0	10
6	Sugihwaras	0	3	4	1	8
7	Widuri	0	4	6	0	10
8	Wanarejan Selatan	1	4	5	1	12
9	Beji	0	5	5	0	10
10	Petarukan	0	2	6	0	8
11	Purwoharjo	1	1	4	0	6

Sumber: ASN Dalam Angka, 2023

Ketersediaan pegawai sangat berpengaruh terhadap kinerja sebuah unit kerja. Jumlah pegawai yang cukup dan tersebar merata akan memastikan bahwa setiap unit kerja dapat beroperasi dengan efisien dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Berdasarkan data yang ditunjukkan pada tabel 2.3, terlihat bahwa distribusi pegawai di kelurahan-kelurahan belum merata dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan standar pelayanan di tingkat kelurahan. Kelurahan yang mempunyai komposisi pegawai paling sedikit yaitu Kelurahan Purwoharjo sebanyak 6 (enam) personil dan terbanyak pada Kelurahan Paduraksa sebanyak 13 (tiga belas) personil. Ketidakmerataan jumlah pegawai ini dapat menyebabkan beberapa kelurahan mengalami kekurangan sumber daya manusia, sehingga pelayanan publik di wilayah tersebut mungkin tidak berjalan dengan maksimal.